

Newsletter

JERAT PAPUA

Edisi 9 : Januari - Maret 2017

Papua Peoples Network for Natural Resources and ECOSOC Rights



**Perampasan Tanah
Menjadi Program Pioritas
JERAT Papua**

About Us :

Jalan Karang - Gang II No. 2 (Belakang Mall Mega Waena) 99358
Kelurahan Waena, Distrik Waena, Kota Jayapura. Papua. Indonesia
Office Phone : +62 (0967) 5170983 Handphone: +6281282637360
Email: office.jeratpapua@gmail.com | Email Pimpinan : septer.beard@gmail.com
Website : http://www.jeratpapua.org | Layanan SMS Gateway : +6281344926655

 jeratpapua.org  page.jeratpapua  @jeratpapua  @jeratpapua

Newsletter

JARINGAN KERJA RAKYAT PAPUA

Edisi Januari - Maret 2017

Rapat Evaluasi Tahunan Jaringan Kerja Rakyat Papua (JERAT) yang berlangsung selama 31 - 2 february 2017, menghadirkan 19 perwakilan masyarakat adat dari 7 wilayah adat Papua. Bertempat di Susteran Maranatha Waena, persoalan perampasan tanah menjadi point penting yang direkomendasikan untuk dikerjakan.

Persoalan Perampasan Tanah di Papua dipandang sangat krusial. Hal ini diutarakan oleh Septer Manufandu, bahwa "Tanah Papua yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan total luasan adalah 42.198.100 hektar. Hutan provinsi Papua dan Papua Barat, telah di-



"Perampasan Tanah di Papua" Jadi Program Prioritas JERAT Papua

petakan berdasarkan fungsinya sejak masa orde baru (1966 - 1998). Dibagi dalam hutan cagar alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang di konversi dan areal penggunaan lain" papar Septer dalam presentasinya.

Kebijakan Pemerintah pusat tentang pemekaran baik provinsi dan kabupaten sangat mempengaruhi eksistensi penyelamatan

hutan tropis di tanah Papua dan memberikan indikasi kuat bahwa pemekaran kabupaten dan provinsi mempunyai hubungan dengan eksploitasi sumber daya alam.

Dijelaskan dalam prentasnya "kondisi ini, mendorong kehadiran perusahaan untuk eksploitasi sumber daya alam (SDA). Sebut saja kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Barat karena sebagai provinsi yang baru dimekarkan membutuhkan dana operasional untuk menjalankan

pemerintahan terutama dalam konsolidasi birokrasinya dan penataan administrasi. Bahkan dana operasional Pemerintahan Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 2003-2007, merupakan kontribusi dari perusahaan-perusahaan HPH, Perkebunan, Perikanan dan LNG Tangguh di wilayah administrasi Papua Barat" pungkas Septer yang juga sebagai Sekretaris Eksekutif JERAT Papua.

.....lanjut. Hal 2

Setelah ada revisi terhadap Undang-undang Otonomi Khusus melalui Undang-undang nomor 35 tahun 2008, lanjut Septer "Revisi Otsus untuk mengakomodir dan mengubah nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat, ba-

Land Grabbing, atau perampasan tanah oleh korporasi-korporasi besar di bidang pangan atas tanah-tanah rakyat adalah nama baru bagi trend lama yang terus terjadi di dunia, tak terkecuali Indonesia.

mulah provinsi ini secara hukum sah mendapatkan dana otonomi khusus dari pemerintah Pusat".

"Pembagian kawasan hutan ini baik di propinsi Papua dan Papua Barat dimana pemerintah menggunakan kewenangan dan kekuasaannya sebagai organisasi tertinggi untuk menentukan dan menetapkan kawasan-kawasan tersebut tanpa melibatkan masyarakat adat pemilik hak ulayat untuk menentukan batas-batas tersebut" tutupnya.

Masalah perampasan tanah ini juga dikeluhkan oleh perwakilan masyarakat adat yang hadir dari kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Waropen, Supiori, Biak Numfor, Yapen, Sorong, Sorong Selatan, Fak-fak, Teluk Bintuni, Yahukimo, Merauke, Bovendigul dan beberapa lembaga



Kelompok Pembahasan Masyarakat Adat, saat kegiatan JERAT Papua

pendampingan masyarakat adat lainnya yang hadir pada kegiatan ini.

Dari catatan hasil diskusi JERAT Papua dan masyarakat adata yang hadir, bahwa setelah tanah dan hutan di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, sudah tidak ada tempat lagi untuk memperluas investasi para pemodal, kini tanah Papua menjadi incaran dan sasaran proyek-proyek akumulasi modal.

Juga pengalaman yang diambil semenjak era rezim Soeharto hingga rezim pemerintah Joko Widodo, pemerintah aktif mengeluarkan izin-izin penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan dan tanah di Papua, yang diberikan kepada segelintir perusahaan nasional dan transnasional untuk ekstraksi hasil hutan kayu, perkebunan skala luas dan

pertambangan.

Praktiknya, pemberian hak dan izin pemanfaatan tersebut dilakukan tanpa ada konsultasi dan persetujuan masyarakat, terjadi perampasan hak, pelanggaran HAM dan kekerasan, intimidasi, mengalami diskriminasi, manipulasi, kerusakan lingkungan dan deforestasi yang luas.

Masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian dan mendapat gaji buruh murah, kompensasi tidak adil, kehilangan dan kesulitan mengakses sumber pangan yang sehat, terjadi malapetaka banjir dan busung lapar, mereka kehilangan sumber obat-obatan dan identitas kebudayaan. Kehidupan orang asli Papua yang berdiam disekitar proyek semakin sulit, miskin dan terancam punah. (*Markus Imbiri*)



**VOICING THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES
AND PROTECTING THE NATURAL RESOURCES**

Papuans People Network for Natural Resources and Ecosoc Rights

www.jeratpapua.org

Kunjungan ke Yapen, MFP3 dan JERAT Papua Kunjungi Kampung Sarawandori

Serui,- Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua bersama Multi-stakeholder Forestry Programme (MFP3) mengunjungi kabupaten kepulauan Yapen. Kunjungan ini sekaligus sebagai evaluasi kerjasama yang telah berjalan di Yapen sejak tahun 2016 lalu.

Kunjungan yang berlangsung selama dua hari ini, JERAT mengunjungi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Yapen di Tatui, masyarakat adat di kampung Sarawandori, Dewan Adat Yapen dan masyarakat adat kampung Barawai distrik Raimbawi.

Septer Manufandu dari JERAT Pa-

pua, mengatakan kunjungan ini sebagai tindak lanjut kerja-kerja JERAT, MFP3 bersama masyarakat adat Yapen. "Kita sudah bekerja bersama masyarakat adat, dalam waktu satu tahun ini, JERAT dan MFP3 telah membuat draf peraturan daerah (perda) perlindungan hak masyarakat adat yang didasari dari masyarakat dan untuk masyarakat di 7 wilayah adat suku di pulau Yapen ini" jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Julia Kalmirah dari MFP3. "Semua masyarakat dan pihak yang berwenang harus mendorong perda ini, kami bersama JERAT siap membantu, semua ini untuk kebaikan hidup masyarakat adat" ucapnya saat

menikmati jamuan makan siang, bakso rumput laut bersama masyarakat Sarawandori. (10/3/2017)

Sambutan hangat masyarakat kampung Sarawandori diutarakan oleh kepala kampung Maikel Karubaba. "Kami sangat berterimakasih jika ada pihak lain membantu kami dikampung ini, Sarawandori adalah kampung wisata, kami juga punya kerajinan makanan lokal yaitu rumput laut. Kami berharap semua pihak dapat bersinergi dengan kami, hingga tujuan bersama dapat terwujud" harapnya.

Mendengar harapan masyarakat kampung Sarawandori, JERAT Papua langsung memberikan kesempatan kepada kelompok perempuan pengrajin rumput laut untuk berdiskusi bersama JERAT. Hasil diskusi itu JERAT Papua akan memberikan bantuan mesin cetak mie dan membantu design kemasan produksi.

Tak hanya itu, JERAT Papua juga menindak lanjuti sistem informasi kampung Sarawandori berbasis website. Tahun 2016 JERAT Papua telah melaunching Website di kampung Sarawandori ini, tahun ini JERAT Papua mendorong sistem offline dengan aplikasi SIAP (sistem Informasi Administrasi Pedesaan) guna pendataan kependudukan dan administrasi kampung Sarawandori yang lebih baik lagi. **(Markus Imbiri)**



Kepala Kampung (kiri) mr.Tom (tengah) bersama kelompok pengrajin rumput laut, kampung Sarawandori

"Koyoono" Harta Tertinggi Suku Momuna

Dekai - Tanah Papua dikenal dengan "Tanah Surga", hal itu dikemukakan karena begitu banyak keindahan alam dan kaya budaya. Provinsi Papua, merurut data terupdate tahun 2014, Papua memiliki suku-suku sebanyak 248 suku asli di Tanah Papua.

Suku-suku ini tersebar pada 7 wilayah adat, yaitu Tabi/Mamta,

Saireri, Domberai, Bomberai, Anim Ha, La Pago dan Mee Pago yang melingkupi provinsi Papua, Papua Barat, 40 Kabupaten dan 2 Kota.

Kabupaten Yahukimo adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Papua, sesuai dengan nama Yahukimo yaitu terdiri dari 4

suku besar yang mendiami kabupaten tersebut. Ya ; suku Yali, Hu ; suku Hubla, Ki ; suku Kimyal dan Mo ; suku Momuna.

Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua, bekerja bersama suku Momuna. Suku Momuna mempunyai adat istiadat, salah satunya adalah Koyoono (bacanya ; Koyuno).**lanjut.Hal.5**

Koyoono adalah kalung yang terbuat dari Taring Gigi Anjing. Koyoono sebagai harta tertinggi dari budaya Momuna dalam membayar perkawinan, pembunuhan, denda adat dan beberapa nilai tukar adat lainnya.

Taring Gigi Anjing yang digunakan sebagai Koyoono didapati dari anjing yang dipelihara. Masyarakat Momuna mempunyai hubungan erat dengan anjing, bagi mereka anjing adalah sahabat, teman dalam berburu, berkebun dan sebagai penjaga ketika masyarakat Momuna sedang tidur atau beristirahat.

Anjing yang telah mati karena bertarung dengan babi, binatang lain atau anjing yang dibunuh, kepala bangkai anjing akan diramu dengan proses pengasapan (asar) di tungku api. Ada juga anjing yang dibiarkan membusuk di bandar kayu, dusun sagu hingga membusuk habis dan taring giginya diambil.

Tradisi Momuna bagi keluarga yang sedang mengumpulkan taring gigi anjing, wajib menyampaikan kepada keluarga (marga) nya sebagai informasi, karena dengan demikian keluarganya akan menyetujui taring gigi anjing

satu per satu "**koyoo**" (satu taring gigi anjing) hingga terkumpul banyak dan di anyam menjadi Koyoono.

Kepercayaan lain yang diyakini untuk mendapatkan taring gigi anjing adalah lewat mimpi. Masyarakat percaya bahwa lewat mimpi taring gigi anjing akan diberikan oleh sang pencipta (Tuhan) kepada orang-orang tertentu. Biasanya pada orang mempunyai perilaku baik, bangun tidur dari mimpi tersebut, ditangannya ada taring gigi anjing 1 atau 2 biji (**koyoo**).

Taring gigi anjing yang putih, utuh (tampa retak) adalah taring gigi anjing yang lebih tinggi nilai adatnya juga tukarnya.

Hal lain untuk mendapat taring gigi anjing "koyoo" adalah dengan cara barter (tukar menukar) biasanya orang Momuna menukarnya dengan Panah dan Jubi saat sedang pesta babi, pesta ulat sagu dan pesta ular. Bagi mereka dengan adanya pesta seperti itu sebagai ajang untuk bertemu satu sama lain, antar marga satu dengan yang lainnya, maka proses pertukaran juga dapat ber-



langsung dengan baik dan penuh persaudaraan.

Dalam menganyam Koyoo menjadi Koyoono ada beberapa bahan tambahan sebagai penghias yang juga punya nilai adat tersendiri, yaitu kulit bial/kerang yang diambil dari sungai/kali, ada dua jenis ; ukuran kecil adalah **otee** (baca : oti) dan ukuran besar adalah **siki**.

Selain suku Momuna, kalung Taring Gigi Anjing juga digunakan oleh suku-suku sekitar, seperti suku Korowai, Opkaka, Intemaya, Pese, Tokuni, Wemini dan Juwek. (*Markus Imbiri*)

Masyarakat Adat Yapen "Kami Ingin Pemetaan Wilayah Adat"

Serui - Pentingnya pemetaan wilayah adat kian hari mulai menjadi kebutuhan masyarakat adat. Salah satu manfaat pemetaan wilayah adat adalah mengurangi konflik antar sesama pemilik hak ulayat.

Kabupaten kepulauan Yapen, memiliki 7 suku yang mendiami daerah dengan luasan kurang lebih 2.050 km² tersebut. Suku-suku besar tersebut adalah suku Onate, suku Pombawo, suku Busami, suku Arui Sai, suku

Berbai, suku Ampari dan suku 3W (Wondau, Wondei, Wonawa).

"Kami menyadari pentingnya sebuah pemetaan, karena hal tersebut sangat membantu kami masyarakat adat. Pentingnya pemetaan karena kian hari proses pembangunan semakin terasa, tentunya proses jual beli tanah pasti akan menimbulkan pro kontra. Untuk itu sejauh ini kami harus mendata batas-batas wilayah itu dengan baik, dari pemetaan hingga menjadi sebuah peta yang

tentunya sah dan tegal" ucap Elisa Merani, sekretaris pemerintahan adat Dewan Adat Yapen.

Sebagian besar masyarakat adat di Tanah Papua, mempunyai filosofi "tanah adalah Mama/Ibu". Hal tersebut juga dianut oleh 7 suku masyarakat adat di kabupaten kepulauan Yapen.

"Tanah adalah Mama, yang memberikan sumber hidup bagi kami, diatas tanah ada dusun sagu, sungai, tumbuh makanan, tumbuh pohon yang



menjadi tempat tinggal burung Cendrawasih dan lain sebagainya, oleh karena itu tanah harus dijaga" tutur Welem Awairaro, kepala suku Pombawo di kampung Poom 1, distrik Poom beberapa waktu lalu.

Di tempat yang sama, Sabata Rumadas dari Jaringan Kerja Rakyat Papua mengatakan, "program kerja JERAT Papua di kabupaten kepulauan Yapen adalah penguatan masyarakat adat, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Yapen dan beberapa program kerja lainnya. Salah satu dari program kerja tersebut adalah pemetaan wilayah adat, JERAT Papua

menghadirkan metode pemetaan wilayah adat dengan menggunakan Wahana Tanpa Awak (WTA) atau yang disebut *Drone*. Hal ini memang baru, namun kami kolaborasi dengan metode pemetaan partisipatif dengan WTA" jelasnya.

Elisa Merani (tengah), Welem Awairaro (kanan) saat diwawancara JERAT Papua di Kampung Poom

Sabata mengharapkan, peran serta masyarakat adat, tokoh-tokoh adat, pemerintah yang di 7 wilayah ini untuk dapat mewujudkan program dimaksud, dari pemetaan hingga dapat menjadi sebuah peta.

Lanjut, Elisa Merani juga

mengungkapkan harapan tersebut. Elisa menambahkan bahwa Dewan Adat Yapen telah memprogramkan untuk memetakan 7 wilayah ini. Untuk itu Dewan Adat berharap semua dapat berperan aktif.

"Kami ucapkan terimakasih kepada JERAT Papua, KPHP Model Yapen dan juga teman-teman SAMPAN dari Kalimantan yang telah membantu kami Dewan Adat Yapen, kiranya dapat berjalan dalam waktu berjalan ini, agar apa yang diharapkan dapat terwujud untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Adat", harap Elisa

(Markus Imbiri)

12 Kepala Suku di Yahukimo Dilantik Bupati

Dekai -, Bertempat di gedung aula pendidikan distrik Dekai, Bupati Yahukimo Abock Busup melantik 12 kepala sukunya, Selasa 21/2/2017.

Keduabelas kepala suku tersebut perwakilan dari suku Yali, Hubla, Kimyal, Momuna, Hubngal, Yali dan Meek, Unaukam dan Lani. Masing-masing terdiri tiga orang yang

menjabat Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris.

Bupati Abock Busup mengatakan tujuan dari pelantikan kepala suku itu adalah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah karena Yahukimo adalah daerah yang beragam suku, bahasa dan budaya.

"Karena sering terjadi konflik antara suku, maka itu kepala suku yang saya lantik mereka ini agar kerja sama

dengan aparat keamanan dan saling kerjasama, antara suku satu dengan suku lain, dalam menciptakan daerah kita yang aman dan tentram," katanya.

Bupati Abok berharap kehadiran para kepala suku yang mewakili seluruh suku di kota Dekai itu dapat membantu pemerintah dan masyarakat mewujudkan Yahukimo yang aman, tentram, dan damai.

“Jika suatu saat masalah terjadi antara suku, harap bisa diselesaikan sendiri dulu di tingkat suku, tidak bawah ke pemerintah atau pihak kepolisian. Bapak-bapak kepala suku juga bisa menyelesaikannya sendiri melalui hukum adat,” harapnya.

Bupati menambahkan bahwa dalam kepemimpinannya patut bekerja sama dengan menjunjung tinggi 3 pilar yaitu agama, adat dan pemerintah harus sinergi. "Saya juga nanti undang suku nusantara dan kerukunan keluar-

ga yang ada di tanah Papua ini, kita harus bersatu membangun Yahukimo" tutupnya.

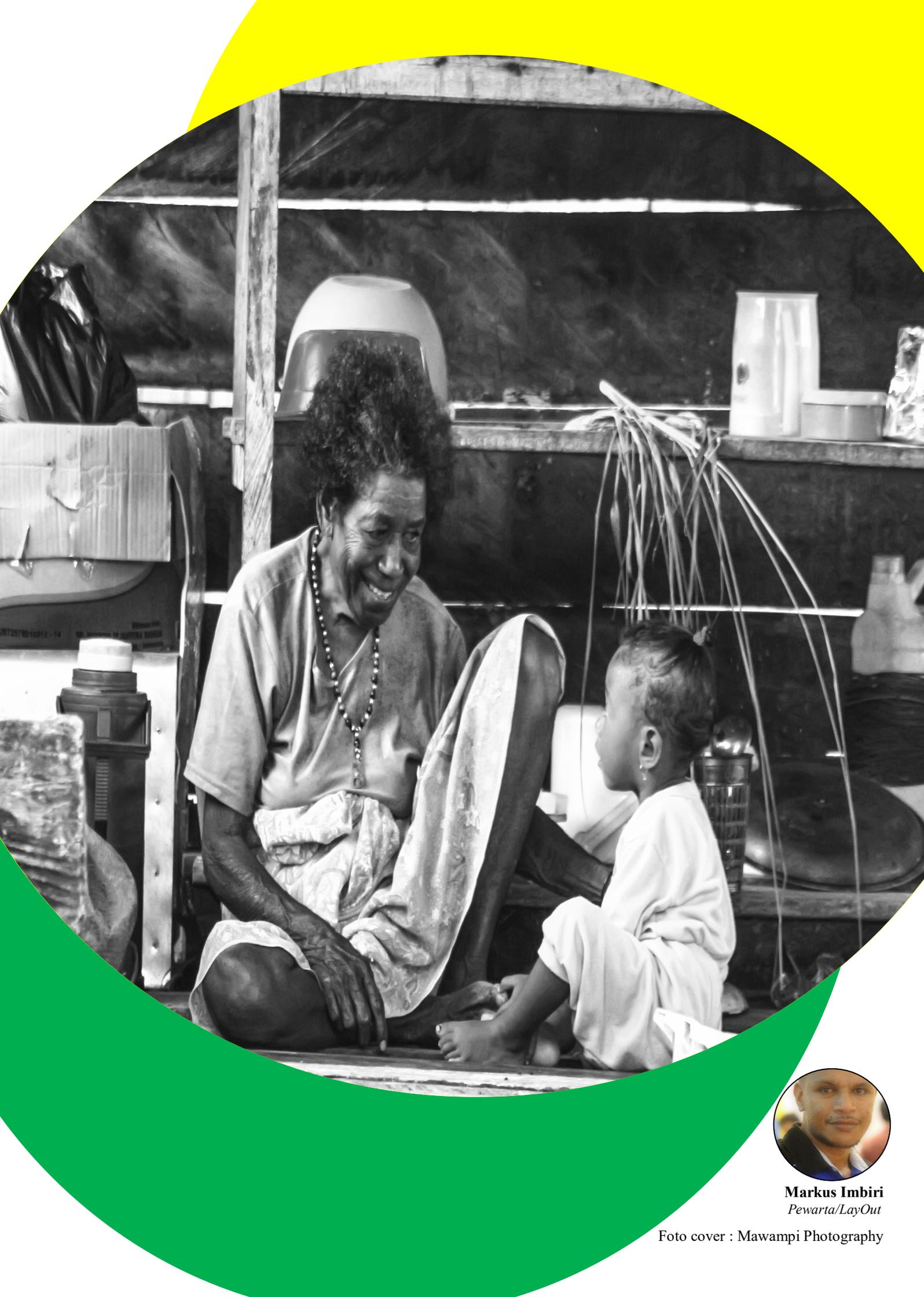
(Markus Imbiri)

ALBUM FOTO



“Program pengembangan kader kesehatan, dengan mengikut sertakan Pemuda dan Pemudi Suku Momuna dari Kabupaten Yahukimo guna mengikuti Program pembelajaran penanganan HIV/AIDS. Program ini kerjasama JERAT Papua dan Klinik Walihole”





Markus Imbiri
Pewart/LayOut

Foto cover : Mawampi Photography